

# JURNAL POLITICO

**PATRONASE DAN KLIENTELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014  
(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-  
2019)**

*Franky RD Rengkung*

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945**

*Burhan Niode*

**EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA  
REFORMASI**

*Josef Kairupan*

**PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
POLITIK**

*Tuerah A.M.R. Gosai*

**HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

*Marlein T Lapiari*

**DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL  
BUDAYA MASYARAKAT**

*(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten  
Minahasa)*

*Johannis E Kaawoan*

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK**

*(Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)*

*Arie Junus Rorong*

**PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA**

*(Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*

*Sarah Sambiran*

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA  
MANADO**

*Johnny P Lengkong*

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN**

*(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten  
Minahasa Utara)*

*Juliana W. Tumiwa*



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO

## JURNAL POLITICO

<b>PATRONASE DAN KLIENTELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)</b> <i>Franky RD Rengkung</i>	1-15
<b>PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945</b> <i>Burhan Niode</i>	16-27
<b>EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA REFORMASI</b> <i>Josef Kairupan</i>	28-39
<b>PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK</b> <i>Tuerah A.M.R. Gosal</i>	40-46
<b>HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b> <i>Marlein T Lopian</i>	47-52
<b>DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT (Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)</b> <i>Johannis E Kaawoan</i>	53-56
<b>PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)</b> <i>Arie Junus Rorong</i>	57-64
<b>PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA (Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)</b> <i>Sarah Sambiran</i>	65-74
<b>PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MANADO</b> <i>Johny P Lengkong</i>	75-86
<b>PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)</b> <i>Juliana W. Tumiwa</i>	87-100

## JURNAL POLITICO

### PELINDUNG

Dekan Fisip Unsrat

### PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

### PEMIMPIN REDAKSI

Drs Burhan Niode, MA

### Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. Jusuf Wowor, MSi

### Dewan

Dr. Drs. Michael Mamentu, MA  
Drs. Johnly Pangemanan, MSi  
Efvendi Sondakh, SIP, MSi  
Drs. Rivo Sumampouw, MSi  
Maxi Egeten, SIP, MSi

### Sekretariat

Trintje Lambey, SIP, MSi  
J. Tompodung, SIP, MSi

### Lay Out & Sirkulasi

Franky R.D Rengkung, SIP, MA  
Hendra Pulukadang, SIP

### Alamat :

Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado  
Telp. 0431 – 862586 Kode Pos 95115  
Email : [politico.unsrat@yahoo.com](mailto:politico.unsrat@yahoo.com)

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO

## DAFTAR ISI

### Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014

*(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)*

Franky RD Rengkung 1-15

### Pemikiran Politik Islam Dalam Proses Penetapan UUD 1945

Burhan Niode 16-27

### Eksistensi Militer Dalam Menegakkan Demokrasi Indonesia Di Era Reformasi

Josef Kalrupan 28-39

### Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Tuerah A.M.R. Gosal 40-46

### Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Marijen T Lopian 47-52

### Dampak Program Pariwisata Terhadap Orientasi Sistem Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)

Johannis E Kaawaan 53-56

### Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik

*(Suatu Studi di Kecamatan Sario Kota Manado)*

Arie Junus Rorong 57-64

### Perilaku Aparatur Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja

Sarah Sambiran 65-74

### Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Manado

Jahny P Lengkong 75-86

### Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan

*(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan Di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)*

Juliana W Tumiwa 87-100

## PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK

Oleh: Tuerah A.M.R. Gosal<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Pendidikan politik bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menghayati sebaik-baiknya nilai yang terkandung dalam sistem yang hendak dimantapkan. Juga melalui pendidikan politik dapat ditingkatkan politik rakyat dalam rangka pembangunan politik. Sejak memasuki era reformasi, pendidikan politik masyarakat lebih diarahkan kepada pemahaman untuk menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, diantaranya adalah hak untuk menggunakan suara dalam pemilihan umum, serta kewajiban untuk turut serta menjaga dan melaksanakan pencapaian tujuan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pendidikan politik dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diterima masyarakat belum mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam pemilihan umum, hal ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman pada pemilihan umum yang sebelumnya dimana masyarakat terlebih dahulu telah terbiasa dengan politik transaksional, sehingga motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dilatarbelakangi oleh materi.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Politik, Partisipasi Politik

### PENDAHULUAN

Pendidikan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, Pendidikan Politik lebih ditingkatkan agar masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam

kehidupan kenegaraan dan serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dari warga negara yang demikianlah diharapkan akan terjamin kelancaran usaha untuk mencapai tujuan nasional. Dan pendidikan politik akan mengusahakan, menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi/situasi guna meningkatkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik yang diharapkan tercipta suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

Pendidikan politik pada dasarnya berlangsung secara alamiah dalam suatu masyarakat yang lazim dilakukan oleh organisasi sosial politik, Keluarga ataupun pribadi. Pendidikan politik seperti itu sudah tentu akan berkembang secara sendiri-sendiri. Apabila pendidikan politik bersumber dari berbagai aspirasi politik yang berbeda, akan saling bertentangan, oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan politik yang diusahakan secara sadar dan terencana yang bersumber dari aspirasi yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan disepakati secara nasional. Pendidikan politik yang demikian jelas akan menunjang terpeliharanya stabilitas nasional memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa

Dengan demikian dapat diperkirakan dan diharapkan bahwa pendidikan politik yang direfleksikan dengan partisipasi politik yang baik akan dapat mengatasi segala kemungkinan bahaya dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Pendidikan politik dimaksud disini adalah keseluruhan untuk memantapkan mekanisme yang mengatur bagaimana keputusan politik atau kebijaksanaan umum dirumuskan dan ditetapkan.

Dengan memadukan pengertian diatas, maka secara umum pendidikan politik merupakan bagian dari sistem politik yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme melalui mana setiap keputusan politik atau kebijaksanaan umum diatur, dirumuskan dan ditetapkan dengan mengikut sertakan masyarakat melalui wakil-wakilnya serta menganut asas musyawarah untuk mufakat. Sistem Demokrasi Pancasila ini dalam setiap

<sup>1</sup> Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Sam Ratulangi

kegiatannya ini diharapkan akan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila secara utuh.

Sebagai usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik dapat ditempuh melalui pendidikan politik, karena pendidikan politik bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan umum dalam rangka memantapkan pembangunan bagi segenap masyarakat Indonesia demi terciptanya suasana dan harapan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pendidikan politik yang dilakukan secara sadar dan berencana pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adalah tonggak bangsa Indonesia, sehingga merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itulah sebabnya pendidikan politik sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sehingga akan mendorong dan mengembangkan serta meningkatkan partisipasi politik dalam usaha-usaha pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: sejauh mana pendidikan politik dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Wori. Pengambilan sampel ditentukan secara acak proposional/proposional random sampling (S. Hadi, 1993:81) dalam hal ini jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 50 orang responden, yang dipilih secara acak.

Adapun variabel dari penelitian ini adalah *pendidikan politik* sebagai *variabel bebas* atau *independen* dan *partisipasi politik*

*masyarakat* sebagai *variabel terikat* atau *dependen*. yang secara operasional dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan Politik adalah usaha untuk mendidik warga negara agar mengetahui norma-norma, nilai, tata cara, dan aturan dalam kehidupan berbangsa sehingga menjadi sadar akan sistem politik yang dianut negaranya termasuk hak dan kewajibannya serta ancaman-ancaman dari sistem politik itu.
- b. Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik baik itu berlaku dalam pengambilan keputusan pemerintah, proses pemilihan umum, serta aktivitas politik lainnya.

Untuk mendapatkan data primer maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Digunakan juga wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat pada jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang diambil secara acak. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data informasi dari masyarakat dengan cara penyebaran daftar kuesioner, terutama tanggapan masyarakat terhadap partisipasi politik. Arikunto (1998:246) menyebutkan bahwa dengan teknik deskriptif kualitatif dengan prosentase, pencarian prosentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipresentasikan itu dan disajikan tetap dalam bentuk prosentase.

#### PEMBAHASAN

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang usaha melestarikan Pancasila sebagai budaya politik bangsa. Maksud yang terkandung dalam pendidikan politik yang memberikan pedoman kepada generasi muda di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa, guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dan searah dengan cita-cita perjuangan bangsa sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan strategi pembangunan

nasional, antara lain perlu diberi pengetahuan politik, dalam hal ini adalah pendidikan politik. Adalah suatu kenyataan setiap Masyarakat selalu mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang dibawa oleh pengaruh lingkungan dan keadaan sosial, ekonomi dan politik pada saat tertentu. Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pembekalan selain berupa bimbingan dan pengarahan sesuai prinsip kebersamaan juga pembekalan ideologis, yang harus dimulai sejak kecil baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, juga melalui kursus-kursus dan lokakarya. Dengan rangkaian usaha ini pada hakekatnya adalah dalam rangka proses peralihan dari pelestarian nilai-nilai Pancasila. Namun yang penting dalam pembekalan ini adalah adanya kesadaran, kemauan dan tekad dari masyarakat untuk berani maju dan tampil ke depan, dalam melaksanakan tanggung jawab nasional yang lebih besar berdasarkan identitas dan kepercayaan kepada kekuatan sendiri.

Dengan demikian, pendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing, menjunjung tinggi hukum, memulainya agama, luhur budinya. Ini karena di dukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat. Bahwa pendidikan politik, mengandung makna mempertajam nalar seseorang dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dunia internasional.

Sasaran luhur yang lain dari pendidikan politik, yakni kesadaran moral yang tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan hidup bangsa sebagai Pancasila yang menjiwai seluruh masyarakat kita, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur di kawasan nusantara yang damai sejahtera dalam pergaulan bangsa-bangsa yang bersahabat di muka bumi ini.

Pendidikan politik dapat menumbuhkan semangat di dalam Masyarakat, dengan berbagai cara antara lain: ceramah tentang contoh teladan dari para Tokoh-tokoh masyarakat, serta beberapa cara lain seperti:

1. Bahan-bahan bacaan dari surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan bisa membentuk pendapat umum.
2. Siaran-siaran radio maupun televisi.
3. Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat itu, apakah itu merupakan organisasi yang bersifat sosial, agama maupun bersifat politik.

Dari kegiatan yang disebutkan diatas, memang sangat diharapkan pendidikan politik benar-benar dilaksanakan agar benar-benar masyarakat khususnya generasi muda lebih aktif. Berbicara tentang pendidikan politik yang paling dominan adalah ideologi Pancasila yang diartikan sebagai cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk memperoleh kemajuan dan perbaikan disegala bidang demi mencapai kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Ideologi Pancasila secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman mencapai cita-cita, dasar-dasar dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan yang harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk dapat mengetahui perlunya ideologi bagi suatu bangsa dalam hidup bernegara terlebih dahulu di jelaskan fungsi ideologi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hidup suatu bangsa yang beraneka ragam, ideologi berfungsi sebagai dasar atau kerangka bagi kehidupan bersama, juga sebagai pemberi arah tujuan terhadap pemikiran dan kegiatan bersama dari suatu unsur yang ada dalam suatu masyarakat negara. Oleh karenanya, negara sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan dan bersifat nasional hanya akan dapat dikemudikan secara terarah dan

efisien apabila ada gambaran yang jelas mengenai hakekat, tujuan dan susunannya.

Melihat fungsi ideologi seperti terurai di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa gambaran mengenai hakekat, tujuan dasar dan susunan suatu negara itu terkristalisasi dalam bentuk ideologi, dan ideologi itu adalah yang bersifat nasional. Dengan demikian ideologi nasional sangat penting artinya bagi kehidupan suatu bangsa dalam hidup bernegara ataupun masyarakat. Tanpa ideologi nasional, kehidupan bangsa yang bersangkutan akan terombang-ambing, sebaliknya dengan ideologi nasional bangsa yang bersangkutan akan kokoh kuat karena memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana telah disepakati bersama bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, maka Pancasila disamping itu juga merupakan ideologi atau pandangan hidup bersama yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga merupakan pantulan kepribadian bersama, karena Pancasila memberi corak dan ciri khas kepada bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain. Pancasila adalah kesadaran dan cita-cita moral yang berupa di dalam kebudayaan Indonesia, Pancasila adalah jiwa Bangsa Indonesia, karena itu Pancasila menuntut dari kita semua untuk memelihara dan mengembangkan sikap seimbang, selaras dan serasi dalam kehidupan. Semangat seperti itu pula diharapkan hendaknya menjiwai dan mewarisi pemikiran dan kegiatan dalam menterjemahkan Pancasila dalam seluruh perikehidupan bangsa Indonesia baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan sehingga dengan demikian akan terwujud suatu masyarakat Pancasila yang merupakan salah satu dari sekian banyak pokok-pokok Ideologi Nasional Pancasila. Adapun masyarakat yang demikian ialah suatu masyarakat yang berada, dimana dalam pergaulan sehari-hari sesama anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati dan saling menghargai, bantu membantu, tolong menolong, mengetahui akan hak dan kewajiban masing-

masing, menunjang akan hukum yang berlaku serta seluruh masyarakat dapat merasakan hidup yang penuh kedamaian dan keamanan material dan spiritual. Mengingat dalam masyarakat Pancasila adalah di dukung dengan moral yang jujur dan baik, yaitu moral Pancasila itu sendiri, dimana tingkah laku lahiriah manusia-manusia individu dalam masyarakat didasarkan atas Pancasila.

Secara ilustratif, maka dapat digambarkan bahwa masyarakat Pancasila ialah suatu masyarakat dimana tegaknya Demokrasi, tegaknya Undang-undang, tegaknya keadilan, tegaknya hak asasi manusia demi terwujudnya kesejahteraan yang erat yang sudah terlaksana sebaik mungkin.

#### 1. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Ada bermacam-macam mengenai kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik bentuk dan intensitas. Menurut pengamatan, bahwa yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Sebaliknya kecil jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktifitas politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Diantara basis dan puncak terdapat pelbagai kegiatan yang berbeda-beda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari orang yang bersangkutan. Termasuk didalamnya (mulai dari kegiatan yang kurang intensif); memberi suara dalam pemilihan umum, membaca secara teratur berita politik dalam surat kabar, menghadiri rapat yang bersifat politik, menjadi anggota kelompok kepentingan atau anggota partai, melibatkan diri dalam pelbagai proyek pekerjaan sosial, pejabat-pejabat dan bekerja aktif sebagai anggota kelompok kepentingan atau partai politik. Yang lebih

intensif lagi adalah melibatkan diri dalam kampanye pemilihan dan yang paling intensif, sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan prosentase orang yang memilih dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Ternyata juga bahwa pendapatan, pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain orang yang berpendapatan tinggi, yang berpendidikan baik, yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah. Akan tetapi, memberikan suara dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagi pula pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi. Masih terdapat pelbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinyu dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa presentase partisipasi dalam pemilihan umum sering kali berbeda dengan prosentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti pelbagai kegiatan politik. Berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung kepada partisipasi politik masyarakat dan bahwa pengikut sertaannya akan membantu penanganannya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dan sebagainya.

## 2. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan

Belum ada definisi partisipasi politik yang memusatkan dan mencakup seluruh ruang lingkup yang berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan. Adalah kurang tepat untuk memulai dari beberapa batasan pemikiran opriori yang dapat mewakili intisari dari partisipasi politik, akhirnya mereka tiba pada suatu kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam

pembangunan yang disebut sebagai "development participation", sebagai berikut :

1. Keterlibatan rakyat di dalam proses pembuatan keputusan .
2. Keterlibatan dalam implementasi dari program-program
3. Keterlibatan dalam benefits dan evaluasi dari setiap program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bintoro (1991:225) menyatakan bahwa:

- a. Terlibat dan ikut saertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme atau proses politik dalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat , maka arah dan tujuan pembangunan hendak mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partyisipasi masyarakat dalam keterlibatan politik dalam proses politik.
- b. Meningkatkan artikulasi untuk merumuskan tujuan dan terutama cara dalam merencanakan tujuan sebaliknya. Oleh karena itu pada umumnya perlulah pengarah mengenai cara dan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yang disebabkan oleh partisipasi politik. Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat terutama organisasi-organisasi kemasyarakatan sendiri untuk mendukung proses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena proses pembangunan memerlukan pembaharuan orientasi, nilai-nilai, sikap maupun struktur kelembagaan dalam masyarakat.
- c. partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik, terkandung dari sistem dan tata cara penyelenggaraan yang berlaku bagi satu negara. Adakalanya dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih bersifat mobilisasi dari pada partisipasi. Misalnya saja pengerahan tenaga untuk bekerja secara sementara waktu pada kegiatan-kegiatan usaha tertentu



yang bersifat pembangunan. Cara ini kegiatannya lebih bersifat sosialisasi ekonomi, mobilisasi kegiatan ini dapat dikenakan antara lain kepada pekerja-pekerja di daerah perkotaan, untuk bekerja di daerah pedesaan atau dalam rangka pembangunan wilayah, suatu kegiatan masyarakat yang dapat diselenggarakan atas dasar kesukarelaan, tetapi seringkali pola kekuasaan dan iklim tradisional yang dipergunakan adalah dengan cara mobilisasi gotong royong. Pada dasarnya gotong royong tersebut adalah berdasarkan sukarela, saling membantu bekerja untuk sesuatu kegiatan yang menyangkut kepentingan sebagian anggota masyarakat. Ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstren yang menggerakkan untuk kegiatan tertentu (mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan dengan cara gotong-royong. apabila tidak maka gotong-royong dapat melupakan partisipasi sukarela. Pemerintah dapat pula melaksanakan pengarahannya yang pada akhirnya menggerakkan atau mengairahkan partisipasi masyarakat. Disini dilakukan cara-cara yang tidak langsung dan dengan menggunakan azas keadilan, perangsang untung rugi, pelayanan dan lain-lain. Kebijakan yang dapat dilakukan meliputi berbagai bidang seperti kebijaksanaan fiskal, budget, perkreditan, perdagangan, harga dan juga program-program seperti penyuluhan, pembinaan, informasi pasar dan lain-lain. Suatu sistem pemungutan pajak yang adil dapat lebih menggerakkan kesediaan masyarakat membayar pajak. Ini adalah bentuk partisipasi yang mutlak perlu dalam bernegara. Pembinaan dan program perkreditan dapat dilaksanakan untuk menunjang pembinaan pengusaha kecil dan menengah, sehingga menggairahkan sektor usaha masyarakat, program penyuluhan pertanian yang dibarengi dengan bantuan perkreditan dan organisasi ekonomi tingkat pedesaan, dapat

mengembangkan kegiatan masyarakat sektor pedesaan.

- d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut. Pada pokoknya partisipasi dalam pembangunan lebih dapat terselenggarakan dalam masyarakat, apabila rakyat merasa berpartisipasi dalam formulasi arah dan cara pembangunan. Dua yang terakhir sering disebut juga sebagai pemerataan dalam memikul beban pembangunan (dapat dilakukan terutama dalam sistem perpajakan) dan pemerataan hasil pembangunan (misalnya melalui program bantuan desa, pendidikan dasar, kesehatan rakyat dan lain-lain).

Selain partisipasi merupakan salah satu unsur dalam pembangunan politik, partisipasi dapat pula dijadikan landasan bagi pembangunan politik dan pemertahanan bangsa. Disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergerakannya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Dilain pihak proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi. Misalnya dengan pembangunan diharapkan terjadi perluasan kesempatan itu, kesediaan dan kemampuan bekerja anggota masyarakat didalamnya, adalah bentuk partisipasi yang paling mendasar.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pendidikan politik masyarakat sangat penting artinya agar masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga makin mampu ikut serta berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat

berbagas dan bernegara serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat ikut serta terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan Nasional Bangsa Indonesia

2. Partisipasi politik wujud dari kesadaran akan hak dan kewajiban warga masyarakat/negara yang diperoleh melalui pendidikan politik, disadari pula bahwa kedua hal ini tidak dapat dipisahkan atau mempunyai hubungan yang sangat erat sebab pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai lembaga formal bahkan informal semata-mata untuk memberi pengertian, pemahaman kepada masyarakat agar menyadari akan hak maupun kewajibannya secara baik dan bertanggung jawab agar turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah kecamatan yang merupakan pembangunan yang integral dengan pembangunan nasional.

#### Saran

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan politik tentunya diharapkan adanya peran serta pembinaan lembaga pendidikan baik formal, informal dan non formal dalam upaya memberikan pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab dalam partisipasi politik.

#### DAFTAR PUSAKA

- Alvian, 1986. Pemikiran dan perubahan Politik Indonesia. PT. Gramedia Jakarta.
- Arbit, Senit, 1980. Sistem Politik Indonesia, Penghampiran, dan Lingkungan. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 1982, Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta.
- Budiman, Arief dkk, 1999. Memilih Partai Mendambakan Presiden " Belajar Berdemokrasi di Ufuk Milinium". Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Chepy Harry Cahyono, 1985. Ideologi Politik. PT. Henindita, Yogyakarta.
- Denny J. A, 1999, Visi Indonesia Baru Setelah Gerakan Reformasi 1998, Jakarta, Jayabaya University Press.
- Farchan, Buklin, 1988. Analisis Kekuatan Sosial Politi di Indonesia. LP3ES, Jakarta.
- Fatah Eep, S. 1999. Membangun Oposisi "Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan". Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Haryanto, 1992. Partai politik Suatu Tinjauan Umum. Liberty, Yokyakarta.
- Huntingon, Samuel P dan Joan Nelson, 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasaruddin Syamsudin, 1993. Dinamika Sistem Politik Indonesia, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusadi Kataprawira, 1983. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Kalaedoskop Politik di Indonesia. PT. Bima Aksara, Jakarta.
- Suharsimi Arikonto, 1985, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1989. Metodologi Penelitian Sosial. PT. Gramedia, Jakarta.